

FACTORS AFFECTING LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Alifia Dwi Sundari¹, Wahyu Pramesti²

UIN Raden Mas Said Surakarta^{1,2}

alifiads15@gmail.com¹, wahyu.pramesti@staff.uinsaid.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyse how local government size, capital expenditure, audit opinion, and follow-up audit recommendations on the financial performance of provincial local governments in Indonesia for the 2019-2022 period. Quantitative research uses secondary data from budget realisation reports, balance sheet reports, audit opinions, and follow-up reports on audit results. The sampling technique in this study used saturated samples so that 136 samples were obtained. This study uses panel data regression analysis conducted using Eviews 10. This study shows that local government size and capital expenditure have a positive effect on local government financial performance. This shows that the larger the size of the local government and capital expenditure, the better the financial performance of the local government. Meanwhile, audit opinion and follow-up on audit recommendations have no effect on local government financial performance. This indicates that audit opinion does not reflect good financial performance. In addition, the follow-up of audit recommendations has not been able to improve financial performance. These findings are expected to contribute to the formulation of more effective financial management policies so that they can encourage an increase in local government financial performance.

Keywords: *Financial performance, size government, capital expenditure, audit opinion, follow-up audit recommendations*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana ukuran pemerintah daerah, belanja modal, opini audit, dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia selama periode 2019-2022. Penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, opini audit, dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh sehingga diperoleh 136 sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang dilakukan Eviews 10. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah dan belanja modal maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Sedangkan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan opini audit tidak mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Selain itu, tindak lanjut rekomendasi audit belum mampu meningkatkan kinerja keuangan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif sehingga bisa mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Ukuran Pemerintah daerah, Belanja Modal, Opini Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

PENDAHULUAN

Setiap daerah wajib mengelola keuangan secara mandiri sesuai dengan kebijakan otonomi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan ini harus

memanfaatkan potensi masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah bergantung pada pengelolaan keuangan daerah.

Apabila tata Kelola pemerintah dan pembangunan daerah berjalan dengan baik dapat mendorong kenaikan kinerja pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019). Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab 1 Pasal 1 Ayat 32 menjelaskan kinerja adalah hasil dari tindakan yang akan atau telah dilakukan terkait anggaran yang dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan penting untuk dilakukan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghimpun dan mengelola sumber daya keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah, mendukung operasional pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan pembangunan wilayah sehingga tidak ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Insani et al., 2023). Pendapatan dan belanja daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tertentu dapat menjadi tolak ukur kinerja keuangan daerah. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah dilihat dari pendapatan, kapasitas pembangunan, dan pelayanan masyarakat (Putri & Yuniarta, 2023).

Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan daerah menggunakan rasio derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi menunjukkan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah (Zamzami & Rakhman, 2023). Pemerintah daerah sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting untuk mencari sumber pendapatan. Hal ini bertujuan supaya pendapatan daerah tidak turun dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di tingkat provinsi di Indonesia pada periode 2019-2022.



Gambar 1. Rata-rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Sumber: DJPK. kemenkeu.go.id, Data diolah

Grafik diatas menunjukkan rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan grafik, kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi tahun 2019 sebesar 36%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 35%. Penurunan rata-rata kinerja keuangan pada tahun 2020 disebabkan karena semua komponen pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Komponen penurunan yang paling besar yaitu retribusi daerah. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sehingga mencapai 38%. Pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 44%. Data tersebut dapat menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia mengalami tren peningkatan. Hal ini pemerintah Provinsi berusaha untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Hasil perhitungan rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah periode 2019-2022 berada pada kategori sedang. Hal ini memperlihatkan pemerintah Provinsi memiliki pendapatan asli daerah yang cukup untuk operasional dan layanan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi dapat melakukan desentralisasi. Akan tetapi, untuk mengurangi ketergantungan transfer pemerintah pusat pendapatan asli daerah harus ditingkatkan.

Penelitian terdahulu menekankan berbagai faktor yang dapat

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah adalah besar kecilnya objek suatu pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan total aset yang dimiliki pemerintah daerah. Aset mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan aset menunjukkan kenaikan kapasitas keuangan yang menggambarkan adanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang besar dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang mendorong produktivitas aset dan kinerja keuangan (R. Lestari & Nurkhin, 2023).

Penelitian Zamzami & Rakhman (2023) menemukan ukuran pemerintah daerah yang besar dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Aset yang besar bisa memperoleh pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan jika dikelola dengan baik. Sesuai dengan penelitian Safitri et al (2022) dan Kirana & Sulardi (2020) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. berbeda dengan penelitian Mahadewi & Indraswarawati (2023) dan Sari & Mustanda (2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara penelitian Julianti et al (2024) dan Noviyanti & Kiswanto (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Suandani & Astawa (2021) menemukan bahwa belanja modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengeluaran yang disebut sebagai belanja modal digunakan untuk membeli aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal dapat meningkatkan layanan publik dengan membangun infrastruktur, fasilitas, dan lainnya. Belanja modal sebagai investasi pemerintah daerah. Belanja modal dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan sumber dana dan ketersediaan infrastruktur dapat membantu efisiensi, produktivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pendapatan daerah akan meningkat yang berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Mubarok et al., 2022).

Penelitian Niswani et al (2022), Suandani & Astawa (2021), dan Kirana & Sulardi (2020) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Zamzami & Rakhman (2023), Safitri et al (2022), Karno & Alliyah (2021) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara penelitian (Insani et al 2023), Mahadewi & Indraswarawati (2023), dan Putri & Yuniarta (2023) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Subagyo et al (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit merupakan pernyataan professional yang mengevaluasi laporan keuangan untuk menilai kewajarannya. Akuntabilitas entitas dapat dinilai menggunakan opini BPK. Opini audit menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Opini audit yang baik meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat akan meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada kinerja keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini baik maka kinerja keuangan tinggi (Sunandani & Astawa 2021).

Sejalan dengan Penelitian Zamzami & Rakhman (2023) dan Masdiantini & Erawati (2016) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Karno & Alliyah (2021) dan Kirana & Sulardi (2020) menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara Insani et al (2023) dan Lestari & Hapsari (2020) tidak menemukan adanya pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan.

Selain opini audit, tidak lanjut rekomendasi audit juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan merupakan cara untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan oleh auditor BPK agar tidak terulang lagi di masa depan. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk mengelola pajak dan retribusi daerah dengan cara transparan sehingga mendorong peningkatan kinerja keuangan. Semakin banyak rekomendasi yang diterapkan diharapkan semakin baik kinerja kedepannya (Zamzami & Rakhman, 2023). Sesuai dengan penelitian Alkhasani & Murtanto (2024) dan Subagyo et al (2021) menyatakan bahwa tindak lanjut audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara penelitian Indriyani & Amalia (2023) menunjukkan bahwa

tindak lanjut rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat inkonsistensi dalam penelitian tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan opini audit sehingga penelitian dilakukan untuk menguji kembali dan memberikan bukti empiris yang baru. Penelitian ini juga mengelaborasi kebaruan terhadap penelitian sebelumnya Zamzami & Rakhman (2023) tindak lanjut rekomendasi audit untuk dianalisis kembali pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan variabel independennya ukuran pemerintah daerah, belanja modal, opini audit, dan tindak lanjut rekomendasi audit.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa principal adalah pihak yang memberikan wewenang sementara agen adalah pihak yang menerima wewenang dalam sebuah hubungan kerja. Dalam hubungan kerja, principal dan agen membentuk hubungan keagenan, dimana principal memiliki kekuasaan untuk memberikan wewenang kepada agen. Tujuan dari teori keagenan adalah untuk memecahkan permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi dan memastikan pihak agen bekerja sesuai dengan ketentuannya. Masyarakat sebagai principal mempunyai wewenang memberikan tugas pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik (Putri & Yuniarta, 2023). Keuangan pemerintah daerah harus

diaudit untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi pemerintah daerah untuk menghindari konflik antara principal dan agen (Karno & Alliyah, 2021).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kinerja yang menggambarkan pencapaian suatu program atau kebijakan pemerintah daerah yang sudah ditentukan selama periode tertentu dengan menggunakan indikator keuangan dalam pengukurannya (Julianti et al., 2024). Pengukuran kinerja keuangan digunakan sebagai cerminan untuk melihat akuntabilitas suatu daerah serta kemampuannya dalam melaksanakan otonomi daerah (Sari & Mustanda, 2019). Penelitian ini mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio desentralisasi. Rasio desentralisasi diperoleh dari perbandingan pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan desentralisasi lebih baik dengan PAD yang lebih besar (Zamzami & Rakhman, 2023).

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan besar kecilnya objek dari suatu pemerintah daerah. Total aset digunakan untuk mengukur besar kecil pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang besar akan memudahkan dalam operasional sehingga pemerintah daerah bisa melayani rakyatnya. Ukuran pemerintah yang besar membuat pendapatan asli daerah lebih mudah diperoleh sehingga meningkatkan keuangan pemerintah daerah (Masdiantini & Erawati, 2016). Berdasarkan teori keagenan, pemerintah

daerah sebagai agen dengan ukuran yang besar akan mampu meningkatkan pelayanan kepada pihak prinsipal yaitu masyarakat. Pemerintah daerah yang besar lebih banyak sumber daya untuk mendukung proyek pembangunan dan meningkatkan kinerja keuangan apabila dikelola dengan baik. Ukuran pemerintah yang besar diawasi oleh berbagai pihak sehingga pemerintah daerah akan mengelola keuangan dengan baik. Dengan demikian, pemerintah daerah besar yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja keuangannya Zamzami & Rakhman (2023), Safitri et al (2022), dan Kirana & Sulardi (2020) menemukan bahwa ukuran pemerintah yang besar dapat meningkatkan kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Belanja Modal

Belanja modal merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan aset tetap atau lainnya dengan manfaat lebih dari satu tahun. Besarnya alokasi belanja modal menunjukkan pemerintah daerah produktif dalam penggunaan aset yang selalu berhubungan dengan pelayanan publik (Suandani & Astawa, 2021). Belanja modal dibagi menjadi lima berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu tanah, bangunan dan konstruksi, jalan, irigasi, jalan, dan lain-lain. Belanja modal pemerintah akan meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan daerah dan kinerja keuangan daerah (Sari & Mustanda, 2019).

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban untuk melayani rakyatnya sebagai principal. Apabila belanja modal dikelola dengan baik maka dapat berkontribusi pada pendapatan daerah sehingga kinerja keuangan akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan belanja modal ditujukan untuk membantu membiayai pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal. Dengan demikian, belanja modal akan menjamin pelayanan publik dan mengoptimalkan keuangan daerah (Suandani & Astawa, 2021). Penelitian yang dilakukan Mubarak et al (2022), Niswani et al (2022), dan Kirana & Sulardi (2020) membuktikan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Opini Audit

Opini audit merupakan hasil yang diberikan auditor atas kewajiban data yang diaudit. Opini audit sangat penting bagi pihak yang membutuhkan untuk melihat hasil dari laporan keuangan pemerintah daerah (Insani et al., 2023). Apabila opini audit memperoleh hasil yang maksimal maka pandangan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah daerah juga akan meningkat. Masyarakat akan percaya kepada pemerintah apabila menunjukkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah yang baik sehingga mendorong mereka dalam menghasilkan pendapatan daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah yang berdampak pada

kinerja keuangan pemerintah daerah (Zamzami & Rakhman, 2023).

Teori keagenan menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai agen berupaya untuk mengelola keuangan secara optimal dan memberikan pertanggungjawaban sehingga mendapatkan opini audit yang maksimal. Opini audit yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keuangan yang dikelola pemerintah (Suandani & Astawa, 2021). Opini dapat meningkatkan atau menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang telah diaudit. Kepercayaan masyarakat dapat mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah dengan kinerja keuangan yang lebih baik memperoleh opini yang baik (Masdiantini & Erawati, 2016). Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tidak Lanjut Rekomendasi Audit

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, rekomendasi audit adalah saran yang dibuat oleh auditor berdasarkan temuan audit dan disampaikan instansi yang berwenang. Inspektorat daerah sebagai pengawas intern bertugas untuk verifikasi atas kecukupan, keakuratan, dan relevansi dokumen pendukung pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum disampaikan kepada BPK. Upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan mencerminkan komitmen mereka untuk memperbaiki

kinerjanya (Zamzami & Rakhman, 2023).

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah sebagai agen berupaya untuk memaksimalkan rekomendasi dari BPK untuk mengatasi kelemahan yang ada sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bagi pihak principal. Peningkatan kepercayaan akan berdampak pada peningkatan kewajiban yang dilakukan oleh principal seperti pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah akan meningkat yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Alkhasani & Murtanto, 2024). Penelitian Zamzami & Rakhman (2023) menyatakan bahwa banyaknya tindak lanjut rekomendasi audit dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pengukurannya menggunakan instrumen tertentu dan hasilnya dianalisis secara statistik dalam bentuk angka (Suandani & Astawa, 2021). Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran dan laporan neraca pemerintah daerah yang tersedia di www.djpk.kemenkeu.go.id, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh dari website BPK pemerintah daerah, dan tindak lanjut rekomendasi audit diperoleh dari website BPK RI. Populasi penelitian ini adalah 34 Provinsi di Indonesia. Teknik sampel jenuh digunakan dalam penelitian ini sehingga diperoleh sebanyak 136 data dengan

periode pengamatan empat tahun. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi data panel, dengan model persamaan sebagai berikut:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 SIZE_{it} + \beta_2 CS_{it} + \beta_3 OPINI_{it} + \beta_4 FLW_{i,t-1} + \epsilon$$

Keterangan

- KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- i = Cross Section
- t = Periode Waktu
- SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah
- CS = Belanja Modal
- OPINI = Opini Audit
- FLW = Tindak Lanjut Rekomendasi Audit
- α = Konstanta
- β_{1-4} = Besarnya koefisien regresi dari masing-masing variabel
- ϵ = Error
- ϵ = Error

OPERASIONAL VARIABEL

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)	Derajat Desentralisasi PAD $= \frac{\text{Pendapatan Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}}$ (Zamzami & Rakhman, 2023)
Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)	Ln Total Aset (Zamzami & Rakhman, 2023)
Belanja Modal (CS)	Ln Belanja Modal (Zamzami & Rakhman, 2023)
Opini Audit (OPINI)	1= Tidak memberikan opini 2= Opini tidak wajar 3= Opini wajar dengan pengecualian 4= Opini wajar tanpa pengecualian (Zamzami & Rakhman, 2023)

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (FLW)	Tindak lanjut sesuai rekomendasi Total rekomendasi t – 1 (Zamzami & Rakhman, 2023)
---------------------------------------	--

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Uji Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif

Sumber: Output Eviews, 2025

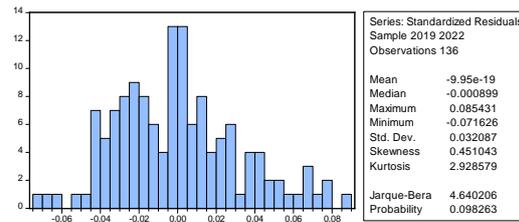
Berdasarkan output uji deskriptif menunjukkan kinerja keuangan

	KKPD	SIZE	BM	OPINI	FLW
Mean	0.379607	30.30241	27.62183	3.985294	0.614344
Median	0.364061	30.15188	27.62664	4.000000	0.621978
Maximum	0.733658	34.16041	30.07787	4.000000	1.000000
Minimum	0.042657	28.47543	25.89569	3.000000	0.125749
Std. Dev.	0.157343	0.966416	0.666948	0.120818	0.234164
Skewness	0.163544	1.356212	0.490694	-8.063183	-0.221049
Kurtosis	2.376415	7.063483	4.461687	66.01493	2.071920

pemerintah daerah memiliki nilai terendah sebesar 0,042657, nilai tertinggi 0,733658, rata-rata 0,379607, dan standar deviasi 0,147343. Pada variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai terendah yang diperoleh sebesar 28,47543, nilai tertinggi mencapai 34,16041, rata-rata 30,30241, dan standar deviasi 0,966416. Pada belanja modal memiliki nilai terendah sebesar 25,89569, nilai tertinggi 30,07787, rata-rata 27,62183, dan standar deviasi 0,666948. Pada opini audit memiliki nilai terendah sebesar 3,000000, nilai tertinggi 4,000000, rata-rata 3,985294, dan standar deviasi 0,120818. Pada variabel tindak lanjut rekomendasi audit memiliki nilai terendah sebesar 0,125749, nilai tertinggi 1,000000, rata-rata 0,614344, dan standar deviasi 0,234164

Uji Normalitas

Tabel. 3 Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan output diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,098263 yang lebih besar dari 0,05 sehingga mengindikasikan data yang berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Output Eviews, 2025

Uji multikolinearitas digunakan mendeteksi korelasi variabel model regresi. Penelitian ini dapat menilai

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.217793	0.351036	-0.620428	0.5364
SIZE	0.002154	0.011772	0.183006	0.8552
BM	0.003933	0.003104	1.266992	0.2082
OPINI	0.013054	0.006749	1.934237	0.0560
FLW	0.004279	0.005867	0.729205	0.4676

multikolinearitas dengan mengkorelasikan variabel independent. Jika korelasi kurang dari 0,90 tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel diatas, nilai korelasi antara variabel independen tidak ada yang melebihi 0,9 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel. 5 Uji Heteroskedastisitas

	SIZE	BM	OPINI	FLW
SIZE	1.000000	0.883892	-0.050523	0.192984
BM	0.883892	1.000000	-0.083135	0.076469
OPINI	-0.050523	-0.083135	1.000000	0.155289
FLW	0.192984	0.076469	0.155289	1.000000

Sumber: Output Eviews, 2025

Tabel uji heteroskedastisitas diatas, memperlihatkan seluruh variabel bebas yang meliputi ukuran pemerintah daerah,

belanja modal, opini audit, dan tindak lanjut rekomendasi audit mempunyai nilai probabilitas $> 0,05$ yang menunjukkan model regresi penelitian ini tidak bersifat heteroskedastiditas.

Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.756073	1.667239	-5.251840	0.0000
SIZE	0.265298	0.055912	4.744940	0.0000
BM	0.038376	0.014742	2.603167	0.0107
OPINI	0.016647	0.032053	0.519364	0.6047
FLW	-0.048584	0.027867	-1.743412	0.0844

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Sumber: Output Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel ukuran pemerintah daerah bernilai probabilitas $0.0000 < 0,05$ dan koefisien sebesar 0.265298. Dengan demikian, hasil uji hipotesis dapat diartikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel belanja modal bernilai probabilitas $0.0107 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,038376. Dengan demikian, hasil uji hipotesis menunjukkan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Opini audit memiliki probabilitas $0.6047 > 0,05$ dan koefisien sebesar 0.016647. Dengan demikian, hasil uji hipotesis membuktikan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel tindak lanjut rekomendasi audit memiliki probabilitas $0.0844 > 0,05$, dan koefisien sebesar -0.048584. Dengan demikian, hasil uji hipotesis dapat diartikan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan (nilai- $p < 0,05$ nilai koefisien sebesar 0.265298) sehingga H_1 diterima. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan ukuran pemerintah daerah maka kinerja keuangan juga akan meningkat. Sesuai dengan teori keagenan pemerintah daerah sebagai agen ditugaskan oleh masyarakat untuk mengelola keuangan pemerintah daerah. Hubungan positif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola aset yang dimiliki dengan baik untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan aset yang besar mampu mengoperasikan sebagai agen dengan baik untuk menyeimbangkan kepentingan antara principal dan agen. Berdasarkan data dalam penelitian, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 memiliki aset tinggi sebesar 34,16040539 dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,67778392. Sementara Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 memiliki aset rendah sebesar 28,47542893 dengan kinerja keuangan pemerintah daerah 0,22329245. Selain itu, ukuran pemerintah daerah yang besar memiliki pengawasan dan pengelolaan keuangan yang baik sehingga aset yang digunakan bisa lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemerintah daerah yang besar dengan pengelolaan aset yang optimal dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Hasil penelitian ini didukung Zamzami & Rakhman (2023), Safitri et al (2022), dan Subagyo et al (2021) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah

daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai probabilitas $< 0,05$ dengan koefisien $0,038376$ sehingga H_2 diterima. Hal ini berarti semakin besar belanja modal maka semakin baik kinerja keuangan yang dicapai. Sesuai dengan teori keagenan pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola belanja modal dengan baik supaya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila belanja modal dialokasikan secara maksimal, maka pelayanan publik akan lebih optimal, infrastruktur membaik, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Belanja modal pemerintah daerah meliputi pembelian dan pembangunan aset tetap, jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung pelayanan publik. Infrastruktur yang baik akan mendorong efisiensi di berbagai sektor, produktivitas masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, apabila pemerintah daerah melakukan banyak pembangunan maka dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah (Mubarok et al., 2022). Berdasarkan data dalam penelitian, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 memiliki belanja modal tinggi sebesar $30,07787345$ dengan kinerja keuangan sebesar $0,73365813$. Sementara Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 memiliki belanja modal rendah sebesar $25,89569424$ dengan kinerja keuangan sebesar $0,25889890$. Hasil penelitian didukung Niswani et al (2022) Suandani & Astawa (2021) dan Kirana & Sulardi (2020) yang

menyatakan bahwa belanja modal memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena nilai probabilitasnya $0,6047 > 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan diukur dengan opini. Namun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memperoleh opini yang baik, tidak secara langsung dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh selama periode 2019-2022 mayoritas daerah dalam penelitian ini memperoleh opini wajar tanpa pengecualian sedangkan daerah yang memperoleh opini non-wajar tanpa pengecualian hanya sedikit. Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 memperoleh opini WTP dengan kinerja keuangan rendah sebesar $0,04265747$. Provinsi Banten pada tahun 2022 memperoleh opini WTP dengan kinerja keuangan sebesar $0,73205357$. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 memperoleh opini WDP dengan kinerja keuangan sebesar $0,41537783$. Salah satu penyebabnya adalah opini audit lebih menilai kepatuhan standar akuntansi pemerintah bukan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diartikan meskipun laporan keuangan disusun sesuai standar sehingga bebas dari kesalahan material tidak menjamin daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. Dengan demikian, daerah yang mendapatkan opini WTP tidak menjamin kinerja keuangan yang lebih baik. Sebaliknya, daerah yang

memperoleh opini non-WTP kemungkinan mengalami kendala dalam administrasi penyusunan laporan keuangan tetapi tetap bisa memiliki kinerja keuangan yang baik. Penelitian ini sesuai dengan Fatimah et al (2023) dan Niswani et al (2022) yang menyatakan bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangannya.

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel tindak lanjut rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena nilai probabilitas sebesar $0.0844 > 0,05$ sehingga H_4 ditolak. Hal ini berarti banyak atau sedikitnya rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data penelitian ini, Provinsi Sumatera Barat memiliki tindak lanjut rekomendasi audit sebesar 0,95 atau 95% yang dihitung berdasarkan data pada tahun 2020. Namun, kinerja keuangan daerah tersebut pada tahun 2021 hanya sebesar 0,45 atau 45%. Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti rekomendasi audit sebesar 100 % pada tahun 2018 namun kinerja keuangan daerah tersebut pada tahun 2019 hanya sebesar 0,25 atau 25%. Hal ini dikarenakan tidak semua rekomendasi audit berkaitan langsung dengan bidang keuangan. Rekomendasi audit mencakup aspek tata kelola, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi meskipun penting namun belum tentu berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, meskipun tindak lanjut rekomendasi audit menunjukkan perbaikan pengelolaan namun tidak cukup untuk meningkatkan kinerja keuangan

pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Indriyani & Amalia (2023) yang menyatakan bahwa saran yang yang ditindak lanjuti tidak berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

PENUTUP KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara opini audit dan tindak lanjut rekomendasi audit tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan aset besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan meningkatkan pelayanan publik sehingga pendapatan daerah mengalami kenaikan yang dapat mendorong kinerja keuangan. Selain itu, belanja modal yang optimal berkontribusi terhadap infrastruktur dan layanan publik yang dapat mendukung kinerja keuangan. Sedangkan variabel opini audit tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Opini audit WTP maupun non WTP tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara tindak lanjut rekomendasi audit juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya rekomendasi yang ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhasani, M. R., & Murtanto. (2024). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ekonomi, Jurnal*

- Akuntansi, Manajemen*, 2(11), 3025–1192.
- Fatimah, A. Z., Muhammad Rafi Zaen, & Salma Putri Mellinia. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 369–384. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2422>
- Indriyani, O., & Amalia, D. (2023). *The Effect of Local Government Size , Leverage , Audit Findings , Follow-up of Audit Recommendations , and Audit Opinion on Local Government Performance. August*, 9–10.
- Insani, A., Rahayu, S., & Misni Erwati. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-36-. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Julianti, H., Agustina, F., & Khoiriyah, Y. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan , Ukuran Pemerintah Daerah , Leverage Terhadap Kinerja Keuangan*. 2(2), 141–152.
- Karno, D. K. S., & Alliyah, S. (2021). The Influence Of Local Government Characteristic and BPK Audit Opinion On The Financiaal Performance Of District/City Governments In Province Jawa tengah. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 3(1), 40–55.
- Kirana, A. S., & Sulardi. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2), 175–192.
- Lestari, E., & Hapsari, W. D. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2743–2750.
- Lestari, R., & Nurkhin, A. (2023). Determinant Factors of Local Government Financial Performance (Using Financial Condition Dimension as Indicator). *Indonesian Management and Accounting Research*, 20(2), 335–360. <https://doi.org/10.25105/imar.v20i2.13968>
- Mahadewi, M. A. M., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Dearah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 107–116. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i2.4031>
- Masdiantini, P., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150–1182.
- Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan*

- Pembangunan Daerah*, 9(6), 503–512.
<https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364>
- Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)., (2010).
- Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, (2017).
- Putri, N. P. A. S., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 133–147. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.62916>
- Safitri, B. W., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). Pengaruh Pad, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Dan Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Ek&Bi*, 5(2), 401–409. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.695>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Suandani, K. P., & Astawa, G. P. B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 2614–1930.
- Subagyo, Sirat, A. H., & Suwito. (2021). The Effect of Audit Results and Local Characteristics on Financial Performance of Province Governments in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 12(14), 57–65. <https://doi.org/10.7176/rjfa/12-14-06>
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004 352 (2004).
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 30 2221 (2004).
- Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 332–347. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>